

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DALAM MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI
KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Muhammad Amin
NPP. 32.0761

Asdaf Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Email: Muhammadamin@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. I Gede Suratha, M.MA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Liang Anggang District records a population growth rate of 4.79%, the highest in Banjarbaru City and exceeding the national average. Although the Quality Family Village Program (Kampung KB) has been implemented as a government strategy to control population growth, its implementation remains uneven and faces several obstacles. **Purpose:** To examine the implementation of the Quality Family Village Program in controlling the population growth rate in Liang Anggang District, Banjarbaru City, South Kalimantan Province. **Method:** This study employed a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants from the sub-district government, relevant agencies, community leaders, and local residents. **Results/Findings:** The Kampung KB Program in Liang Anggang District has only been implemented in a few villages, despite being launched since 2016. The population growth rate reaches 4.79%, the highest in Banjarbaru City. There are 27 employees in the district, but field officers are still limited. The main obstacles include ineffective communication, low public understanding, lack of facilities, and weak cross-sector coordination, as stated by informants from DP3APMP2KB and the Chairperson of the Working Group. **Conclusion:** There is a need to enhance public outreach, strengthen implementer capacity, and foster institutional synergy to optimize the implementation of the Quality Family Village Program as a sustainable strategy for controlling population growth.

Keywords: Policy Implementation, Quality Family Village, Population Growth Rate

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kecamatan Liang Anggang mencatat angka pertumbuhan penduduk sebesar 4,79%, tertinggi di Kota Banjarbaru dan melebihi rata-rata nasional. Meskipun Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) telah dijalankan sebagai strategi pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, implementasinya belum merata dan masih menghadapi berbagai kendala. **Tujuan:** Untuk mengetahui implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi

Kalimantan Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan dari pemerintah kecamatan, dinas terkait, tokoh masyarakat, dan warga setempat. **Hasil/Temuan:** Program Kampung KB di Kecamatan Liang Anggang baru berjalan di beberapa kelurahan meski dicanangkan sejak 2016. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,79%, tertinggi di Kota Banjarbaru. Terdapat 27 pegawai di kecamatan, namun petugas lapangan masih terbatas. Hambatan utama meliputi komunikasi tidak efektif, rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya sarana, serta koordinasi lintas sektor yang lemah, sebagaimana disampaikan oleh informan dari DP3APMP2KB dan ketua Pokja. **Kesimpulan:** Diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas pelaksana, dan sinergi antarlembaga guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Kampung KB sebagai strategi pengendalian pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kampung Keluarga Berkualitas, Laju Pertumbuhan Penduduk

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu isu strategis yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dinamika jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan beragam permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, tekanan terhadap fasilitas publik, hingga degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Di tingkat daerah, Kalimantan Selatan menunjukkan pola pertumbuhan penduduk yang bervariasi di tiap kabupaten/kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan tercatat sebesar 1,70%. Namun demikian, terdapat wilayah yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata provinsi, bahkan nasional. Kota Banjarbaru, sebagai salah satu kota administratif di Kalimantan Selatan, menempati posisi tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 2,77%.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan jika ditinjau lebih dalam pada level kecamatan. Di antara lima kecamatan di Kota Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang mencatat angka pertumbuhan penduduk tertinggi, yakni mencapai 4,79% per tahun. Angka ini menunjukkan tekanan demografis yang cukup besar dan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat guna mencegah dampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Program ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga melalui integrasi layanan lintas sektor di tingkat desa dan kelurahan. Meski telah diterapkan sejak tahun 2016, efektivitas implementasi program ini di Kecamatan Liang Anggang masih belum menunjukkan hasil yang optimal, yang ditandai dengan belum meratanya pelaksanaan program dan masih tingginya angka kelahiran.

Berikut ini disajikan data laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan

Selatan sebagai gambaran umum situasi demografis yang melatarbelakangi pentingnya pelaksanaan Program Kampung KB secara optimal di daerah tersebut:

Tabel 1.

Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (2024)

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan (%)
1	Tanah Laut	365,0	1,59
2	Kota Baru	343,7	1,91
3	Banjarnegara	600,6	2,16
4	Barito Kuala	331,0	2,01
5	Tapin	198,9	1,73
6	Hulu Sungai Selatan	238,8	1,65
7	Hulu Sungai Tengah	268,8	1,35
8	Hulu Sungai Utara	237,1	1,56
9	Tabalong	266,9	1,87
10	Tanah Bumbu	342,4	2,12
11	Balangan	138,1	2,07
12	Kota Banjarmasin	668,8	0,54
13	Kota Banjarbaru	273,5	2,77
14	Kalimantan Selatan	4.273,4	1,70

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru (2,77%) menempati posisi tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang jauh melampaui rata-rata provinsi (1,70%) dan bahkan lebih dari dua kali lipat angka Kota Banjarmasin (0,54%), yang merupakan ibukota provinsi. Fakta ini mengindikasikan bahwa Banjarbaru, khususnya Kecamatan Liang Anggang sebagai wilayah dengan pertumbuhan tertinggi di dalamnya, membutuhkan perhatian serius dalam hal pengendalian jumlah penduduk. Ketidakseimbangan ini juga mencerminkan urgensi penguatan pelaksanaan Program Kampung KB sebagai salah satu strategi kebijakan publik yang berbasis komunitas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meski Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) telah diterapkan sebagai strategi pengendalian pertumbuhan penduduk, Kecamatan Liang Anggang masih mencatat laju pertumbuhan yang tinggi, yaitu 4,79% per tahun. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program di lapangan. Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti faktor komunikasi, sumber daya, dan koordinasi sebagai kunci keberhasilan, namun belum banyak yang mendalami kendala spesifik serta peran disposisi pelaksana dan struktur birokrasi di Liang Anggang. Oleh karena itu, penelitian ini fokus mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis implementasi dan hambatan program Kampung KB di wilayah ini, serta upaya perangkat daerah dalam mengatasi kendala tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya dengan konteks dan lokasi yang berbeda. Maolana dan Zaenuri (2022) dalam penelitiannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa implementasi Program Kampung KB melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah belum fleksibelnya aktivitas organisasi yang menyebabkan belum tercapainya tujuan program secara maksimal. Saputra dan Effendi (2019) meneliti pengaruh pembentukan Kampung KB terhadap pengendalian angka kelahiran di Kabupaten Karawang, dengan kesimpulan bahwa tingginya mobilitas penduduk akibat kawasan industri turut memperparah permasalahan kependudukan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana. Sementara itu, Batubara, Yusri, dan Saddam (2024) menemukan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Meranti Pandak, Kota Pekanbaru belum optimal karena aspek pengorganisasian, interpretasi, dan pelaksanaan program masih lemah. Penelitian lain oleh Hakim (2023) yang dilakukan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa efektivitas Program Kampung KB sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan dukungan pemerintah daerah. Tambahan lainnya dari Prasetyowati, Yudianto, Paradise, dan Sari (2024) di Kabupaten Probolinggo menegaskan bahwa pelaksanaan Kampung KB dapat berjalan baik apabila mendapat dukungan lintas sektor dan pemahaman program yang menyeluruh dari aparatur desa. Seluruh penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program Kampung KB sangat tergantung pada sinergi kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan lokal. Penelitian ini akan memperluas perspektif dengan menganalisis kendala dan strategi dalam implementasi program di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam konteks implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dengan fokus khusus pada Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di Kalimantan Selatan, yakni sebesar 4,79%. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas Kampung KB secara umum atau di tingkat provinsi, penelitian ini mengupas secara mendalam dinamika implementasi program pada level kecamatan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Edward III (dalam Agustino, 2020), yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga menyoroti secara spesifik bagaimana keempat faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan Program Kampung KB di tingkat lokal, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dan strategi penyelesaiannya dari perspektif masyarakat dan pemangku kepentingan setempat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan kependudukan yang kontekstual, berbasis data lokal, dan aplikatif bagi pengambil kebijakan daerah dalam merumuskan strategi pengendalian penduduk yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Secara khusus, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam mengatasi hambatan implementasi tersebut. Sejalan dengan panduan metodologi studi implementasi yang disarankan oleh Levac et al. (2010), penelitian ini juga berusaha memberikan gambaran menyeluruh terhadap konteks, pelaksana, serta strategi kebijakan lokal sebagai bagian dari pendekatan eksploratif yang memperluas pemahaman terhadap pelaksanaan program di lapangan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Simangunsong (2017) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang rasional, empiris, dan sistematis demi mencapai tujuan tertentu. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap konteks sosial dan proses kebijakan secara holistik,

Operasionalisasi konsep penelitian didasarkan pada teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Agustino, 2020). Variabel-variabel ini diukur melalui indikator spesifik yang menjadi pedoman dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga dapat menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program Kampung KB.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive, meliputi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang memahami arah kebijakan, Camat Kecamatan Liang Anggang yang mengetahui pelaksanaan program di wilayahnya, Kasi Kesejahteraan Sosial yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat, empat Petugas Lapangan KB yang berperan langsung di lapangan, empat Ketua POKJA Kampung KB yang menggerakkan kegiatan di masyarakat, serta enam warga sebagai penerima manfaat program. Pemilihan informan ini dilakukan karena mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan program yang diteliti. Pemilihan informan dengan teknik purposive sampling ini sesuai dengan metode Patton (2002) untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam. Data sekunder berupa dokumen resmi, laporan, dan literatur pendukung yang mendukung analisis data (Sugiyono, 2014).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi informan terhadap pelaksanaan program, observasi untuk mengamati kegiatan di lapangan, dan dokumentasi sebagai data pendukung untuk memastikan validitas melalui triangulasi. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Mezmir, 2020). Pendekatan ini selaras dengan metode *thematic analysis* sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2006), yang menekankan pentingnya proses sistematis dalam

mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola bermakna (tema) dalam data kualitatif untuk menangkap kompleksitas realitas sosial. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memenuhi kriteria trustworthiness dalam penelitian kualitatif jika dilakukan secara hati-hati, seperti yang dikemukakan oleh Nowell et al. (2017), yang menegaskan bahwa analisis tematik yang transparan, konsisten, dan reflektif dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Studi-studi sejenis yang menggunakan metode kualitatif untuk evaluasi implementasi program juga dilakukan oleh Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2017) yang mengkaji efektivitas program pemerintah di Amerika Serikat. Penelitian lokal oleh Maulana dan Zaenuri (2022) terkait Kampung KB di Nusa Tenggara Barat serta Saputra dan Effendi (2019) di Kabupaten Karawang menunjukkan pentingnya pendekatan kualitatif deskriptif dalam memahami dinamika lokal pengendalian pertumbuhan penduduk. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat relevansi metode yang digunakan dalam studi ini untuk menghasilkan temuan yang valid dan aplikatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Penelitian tentang "Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru" mengungkap kompleksitas upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data demografis Kota Banjarbaru tahun 2025, jumlah penduduk mencapai 285.546 jiwa, dengan komposisi 143.255 laki-laki dan 142.291 perempuan. Kecamatan Liang Anggang sendiri memiliki 44.206 penduduk yang terdiri dari 21.687 laki-laki dan 22.519 perempuan.

Implementasi program ini dilandasi oleh tantangan utama: mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sambil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proses implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Berdasarkan wawancara dengan Camat Liang Anggang, Bapak Taufik Purwanto, Program Kampung Keluarga Berkualitas dijalankan dengan pendekatan komunikasi multi-saluran yang strategis. Transmisi informasi dilakukan melalui sosialisasi langsung di tingkat kelurahan, penyebaran banner dan media informasi, serta pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Bapak Deny Adi Surya, menambahkan bahwa pendekatan ini tidak hanya fokus pada keluarga berencana, melainkan juga mengintegrasikan program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan holistik ini berpotensi besar menekan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan, dengan keberhasilan yang sangat bergantung pada keberlanjutan sosialisasi, peran aktif tokoh masyarakat, dan evaluasi berkala untuk efektivitas jangka panjang.

Kejelasan informasi menjadi aspek krusial dalam keberhasilan implementasi Program Kampung KB di Kecamatan Liang Anggang. Penyampaian informasi dilakukan secara transparan dan sistematis, dimulai dari tingkat Camat hingga pelaksana di lapangan,

dengan penyesuaian cara penyampaian sesuai karakteristik wilayah. Camat Taufik Purwanto menegaskan bahwa kejelasan bukan hanya soal pesan yang disampaikan, melainkan bagaimana pesan itu dipahami dan diimplementasikan secara menyeluruh. Ketua Pokja Program Kampung KB, Bapak Adi Susanto, menyatakan bahwa informasi dari tingkat atas memang cukup jelas, namun perlu diterjemahkan agar mudah dipahami warga. Dukungan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Guntur Solahudin, menunjukkan bahwa penjelasan langsung di rumah dan sosialisasi di posyandu sangat membantu pemahaman mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Purba (2023) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memperkuat kelembagaan kampung KB. Strategi ini menggabungkan pendekatan administratif, pedagogis, dan kultural dengan keterlibatan tokoh masyarakat serta umpan balik rutin, sehingga memastikan pemahaman dan partisipasi masyarakat yang efektif dalam program.

2. Sumber Daya

Kecamatan Liang Anggang memiliki sumber daya manusia yang beragam dan berkualitas dengan total 27 pegawai, mayoritas berpendidikan sarjana (S1) dari berbagai disiplin seperti Administrasi Publik, Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Teknologi Komputer. Komitmen pengembangan SDM tercermin dari rotasi pegawai yang terencana, pelatihan berkelanjutan, dan sistem mentoring antar pegawai. Keberagaman latar belakang ini mendukung pendekatan multidisipliner dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas, misalnya pegawai ekonomi merancang strategi pemberdayaan ekonomi keluarga, sementara pegawai sosial menangani komunikasi efektif. Dengan demikian, Kecamatan memiliki SDM yang mumpuni untuk menjalankan program secara optimal.

Dalam pelaksanaan Program Kampung KB, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting namun saat ini masih terbatas. Wawancara dengan Bapak Deny Adi Surya mengungkapkan kurangnya alat peraga edukasi dan fasilitas transportasi yang memadai. Petugas lapangan, Bapak Ahmad Riadi, juga menegaskan kebutuhan alat bantu visual untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi. Temuan ini sejalan dengan Ersanda dan Bura (2024) yang menyatakan bahwa sarana pendukung yang memadai menjadi faktor penting dalam pelaksanaan Kampung KB yang efektif. Keterbatasan ini berpotensi menghambat penyampaian informasi dan jangkauan program ke masyarakat. Alat peraga membantu menjelaskan konsep yang kompleks agar mudah dipahami, sedangkan transportasi memastikan aksesibilitas kegiatan di berbagai lokasi. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur menjadi prioritas utama guna mendukung efektivitas program, memperluas partisipasi masyarakat, dan mencapai tujuan pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas keluarga.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Analisis terhadap wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja Program Kampung Keluarga Berkualitas dan masyarakat mengungkapkan pengaruh positif program terhadap motivasi warga. Bapak Rizky menyatakan bahwa terdapat peningkatan motivasi terutama setelah warga melihat manfaat langsung dari program, seperti peningkatan ekonomi, akses kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Hal ini diperkuat oleh Bapak Guntur Solahudin yang menyatakan bahwa Program KKB berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pemahaman yang lebih baik mengenai perencanaan

keluarga dan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keputusan dan tindakan dalam program efektif dalam meningkatkan motivasi warga, yang didorong oleh pengalaman manfaat langsung dan peningkatan pemahaman tujuan program. Dukungan data kuantitatif terkait partisipasi dan perubahan perilaku akan memperkuat kesimpulan ini.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala Program Kampung KB di Kecamatan Liang Anggang menunjukkan persepsi yang umumnya positif. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Bapak Deny Adi Surya, menyatakan bahwa pengawasan berjalan wajar dengan adanya laporan dan evaluasi rutin yang membantu perbaikan kinerja, meskipun diperlukan mekanisme yang lebih partisipatif dan transparan agar masyarakat turut berperan aktif dalam pengawasan. Petugas lapangan, Bapak Muhammad Agus, juga menganggap pengawasan berjalan efektif dan adil, namun perlu pendalaman apakah penilaian tersebut berdasarkan indikator yang jelas atau sekadar persepsi subjektif. Ketua Kelompok Kerja, Bapak Adi Susanto, menambahkan bahwa pengawasan sudah cukup baik tetapi perlu lebih sering dan terjadwal untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitasnya. Secara keseluruhan, pemantauan dan evaluasi program berjalan dengan baik namun masih terbuka ruang perbaikan, terutama dalam hal transparansi, partisipasi masyarakat, dan frekuensi pengawasan untuk menjaga keberlanjutan dan optimalisasi program.

Dalam aspek peningkatan kualitas dan kuantitas, Program Kampung KB menghadapi tantangan signifikan terkait beban kerja dan keterbatasan sumber daya manusia. Petugas lapangan, Bapak Ahmad Riadi, menyampaikan bahwa beban kerja sangat berat akibat jumlah petugas yang terbatas, yang berpotensi menurunkan efektivitas dan cakupan program. Namun, Ketua Kelompok Kerja, Bapak Wahyu, menegaskan komitmen tinggi para pelaksana meskipun menghadapi kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas program perlu difokuskan pada penambahan petugas, pelatihan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dengan penjadwalan dan pembagian tugas yang tepat, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan program. Selain itu, penguatan kemitraan dengan berbagai pihak seperti LSM, ormas, dan sektor swasta juga sangat penting untuk memperoleh dukungan tambahan. Dengan mengatasi keterbatasan sumber daya ini, Program Kampung KB dapat mencapai potensi maksimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Liang Anggang sangat menekankan pentingnya panduan tertulis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai alat utama untuk menjamin konsistensi dan efektivitas program. Petugas lapangan, Muhammad Wira, menegaskan bahwa SOP yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk keberhasilan program. Namun, Ketua Kelompok Kerja, Adi Susanto, memberikan masukan bahwa meskipun SOP membantu, penyederhanaan diperlukan agar panduan tersebut lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kejelasan dan kesederhanaan dalam penyusunan SOP agar dapat benar-benar mendukung pelaksanaan program secara optimal.

Selain itu, analisis terhadap sistem penugasan dan evaluasi dalam program ini mengungkap adanya beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Petugas lapangan, Ahmad Riadi, mengungkapkan bahwa pembagian kerja saat ini belum merata dan belum

mempertimbangkan kemampuan individu secara optimal. Hal senada disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja, Nanang, yang menilai bahwa pembagian tugas kurang efektif dan adil sehingga menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang di antara petugas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan sistem penugasan yang mampu menjamin pembagian kerja yang merata, sesuai kemampuan masing-masing, serta proses yang transparan agar menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan dalam tim.

Evaluasi kinerja pun harus diselaraskan dengan sistem penugasan yang adil dan transparan, dengan kriteria yang objektif dan terukur. Sistem evaluasi yang baik akan memotivasi petugas untuk bekerja lebih optimal dan berkontribusi maksimal terhadap keberhasilan program. Dengan melakukan perbaikan pada sistem penugasan dan evaluasi tersebut, diharapkan efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Liang Anggang dapat meningkat signifikan. Perbaikan ini tidak hanya meningkatkan kinerja petugas, tetapi juga menumbuhkan rasa keadilan yang pada akhirnya mendukung keberhasilan program secara keseluruhan.

3.2. Faktor-Faktor Kendala Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas

Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Liang Anggang menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan jumlah petugas menjadi tantangan utama. Petugas lapangan, Ahmad Riadi, menyampaikan bahwa beban kerja sangat berat akibat minimnya petugas dan sumber daya yang tersedia. Hal ini diperkuat oleh Muhammad Wira yang menekankan pentingnya SOP yang jelas dan terstruktur untuk keberhasilan program, namun Ketua Kelompok Kerja, Adi Susanto, menambahkan bahwa SOP tersebut perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pelaksana. Selain itu, fasilitas penunjang seperti alat edukasi dan transportasi juga masih kurang memadai, sehingga kebutuhan akan sarana transportasi dan media visualisasi untuk edukasi masyarakat menjadi sangat mendesak.

Dari sisi eksternal, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat program menjadi hambatan tersendiri. Rizky, salah satu ketua kelompok kerja, mengungkapkan bahwa detail pelaksanaan di lapangan masih kurang jelas, sehingga mereka sering harus mencari solusi sendiri atas berbagai masalah yang muncul. Kompleksitas birokrasi dan pembagian tugas yang tidak merata juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan program secara optimal. Hal ini ditegaskan oleh Nanang, ketua kelompok kerja lainnya, yang menyatakan bahwa pembagian kerja kurang efektif dan adil sehingga menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang di antara para petugas.

Dengan demikian, kendala utama dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Liang Anggang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung internal, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan masalah birokrasi di luar. Penanganan terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program di lapangan.

3.3. Upaya Perangkat Daerah Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Program Kampung KB

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas, perangkat daerah di Kecamatan Liang Anggang telah mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satu upaya utama adalah peningkatan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan kultural. Informasi disampaikan tidak hanya melalui media cetak dan daring, tetapi juga melalui pendekatan personal dan kunjungan langsung ke masyarakat. Petugas lapangan, Ahmad Riadi, menjelaskan bahwa mereka menggunakan pendekatan bertahap, dimulai dengan sosialisasi massal melalui rapat warga, dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk penjelasan secara individual, dan terakhir menyediakan brosur serta leaflet yang mudah dipahami. Camat Liang Anggang, Bapak Taufik Purwanto, menegaskan pentingnya komunikasi yang sederhana dan pendekatan personal dalam menyampaikan program kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah Kecamatan juga rutin mengadakan pelatihan bagi petugas lapangan dan memperkuat kerja sama lintas sektor dengan Lembaga Swadaya Masyarakat serta organisasi kemasyarakatan guna mendukung pelaksanaan program. Apriyanto (2023) menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi program di tingkat daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pembenahan sistem SOP menjadi perhatian penting. Berdasarkan masukan dari para informan, SOP perlu disederhanakan dan dikontekstualisasikan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Pembagian tugas juga mulai diarahkan agar lebih merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing petugas, di mana Ahmad Riadi menyampaikan bahwa pembagian kerja perlu lebih merata dan memperhatikan kemampuan masing-masing petugas. Dengan berbagai upaya tersebut, perangkat daerah berusaha menjadikan implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas lebih adaptif, efisien, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Strategi ini sejalan dengan hasil penelitian Nababan dan Situmorang (2023) yang menekankan pentingnya pemilihan strategi peningkatan efektivitas pelayanan publik melalui pendekatan analisis terstruktur dan kolaboratif, seperti penggunaan SOAR dan matriks QSPM, yang dapat diadaptasi dalam konteks penguatan kelembagaan Kampung KB.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kecamatan Liang Anggang telah memberikan dampak positif dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, meskipun masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Temuan ini selaras dengan penelitian Nababan, Wasistiono, dan Tahir (2023) yang menyoroti bahwa efektivitas pelayanan administrasi kependudukan juga sangat ditentukan oleh efisiensi kelembagaan, kompetensi petugas, serta sistem pelayanan yang kolaboratif dan terintegrasi antarinstansi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Batubara, Yusri, dan Saddam (2024) yang juga menemukan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal karena lemahnya aspek pengorganisasian dan pelaksanaan program. Sama halnya dengan temuan penelitian Maolana dan Zaenuri (2022), di mana fleksibilitas organisasi dan implementasi program di Provinsi NTB menjadi tantangan utama dalam mencapai tujuan kebijakan. Di Liang Anggang, ketidakseimbangan dalam

pembagian tugas birokrasi dan minimnya pemahaman masyarakat juga turut menghambat efektivitas program.

Berbeda dengan penelitian Saputra dan Effendi (2019) di Kabupaten Karawang yang lebih menyoroti pengaruh kawasan industri dan mobilitas penduduk terhadap angka kelahiran, penelitian ini lebih menekankan pada hambatan internal program seperti distribusi pelaksana dan sarana penunjang. Temuan ini juga memperkaya hasil penelitian Hakim (2023) di Kabupaten Gowa, yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, tetapi menambahkan aspek pentingnya dukungan fasilitas lapangan dan strategi komunikasi berbasis kearifan lokal.

Selain itu, penelitian Prasetyowati et al. (2024) di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa keberhasilan Kampung KB sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur desa dan keterlibatan lintas sektor. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian di Kecamatan Liang Anggang yang merekomendasikan penguatan peran perangkat kelurahan dan peningkatan koordinasi horizontal sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan program. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mendukung tetapi juga memperluas pemahaman terhadap dinamika implementasi Program Kampung KB di berbagai wilayah, khususnya dalam konteks daerah dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi seperti Kecamatan Liang Anggang.

IV. KESIMPULAN

Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kecamatan Liang Anggang telah berkontribusi dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Implementasinya sesuai dengan teori Edward III, khususnya pada aspek komunikasi dan disposisi pelaksana, meskipun masih terdapat kendala dalam sumber daya dan struktur birokrasi. Partisipasi masyarakat cukup tinggi, dan program berhasil menurunkan angka kelahiran serta mendorong kesadaran terhadap pentingnya perencanaan keluarga. **Keterbatasan Penelitian** Penelitian ini hanya dilakukan di satu kecamatan sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya membatasi eksplorasi terhadap pandangan masyarakat yang lebih luas, terutama kelompok rentan. Data juga dikumpulkan saat program masih berlangsung, sehingga bersifat situasional. **Arah Masa depan Penelitian**, Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data statistik seperti angka kelahiran dan partisipasi keluarga. Studi perbandingan antarwilayah juga penting untuk memperoleh pemahaman lebih luas. Pendekatan partisipatoris dengan melibatkan masyarakat langsung juga dapat memperkuat evaluasi dan pengembangan kebijakan program.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru serta seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi berharga untuk penelitian ini. Terima kasih saya juga sampaikan kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan dan motivasinya selama proses penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga skripsi ini selesai dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Leo Agustino, P. D. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2). CV Alfabeta.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

B. JURNAL ILMIAH

- Apriyanto, M. R. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Batubara, A. S., Yusri, A., & Saddam, A. (2024). Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru. *Pendidikan Ilmu Sosial*, 9(1), 53–61. <https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.53-61>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2017). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12338>
- Ersanda, A., & Bura, A. (2024). *EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TARANDAM GUNA MENCIPTAKAN KELUARGA MANDIRI DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Hakim, M. K. (2023). *EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K.K. (2010). *Scoping studies: advancing the methodology*. *Implementation Science*, 5(69). <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>
- Maolana, L. A. C., & Zaenuri, M. (2024). Implementasi Program Kampung KB dalam menekan pertumbuhan penduduk di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Janabadra*, 6(1). <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17330>
- Mezmir, E. A. (2020). Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation. *Research on Humanities and Social Sciences*, 10(21), 15–27. <https://doi.org/10.7176/rhss/10-21-02>
- Nababan, W., & Situmorang, E. G. V. (2023). Strategi Peningkatan Keefektifan Mal Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sumedang Menggunakan Analisis Soar Dan Matriks Qspm. *Jurnal Registratie*, 5(1), 1-19.
- Nababan, W., Wasistiono, S., & Tahir, M. I. (2023). Keefektifan Mal Pelayanan Publik

- Pada Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Konstituen*, 5(1), 36-55.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). *Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria*. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Prasetyowati, Y. D., Yudianto, E., Paradise, I., & Sari, A. K. (2024). Implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 3(6), 513–522. <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/7948>
- PURBA, M. I. A. F. (2023). *Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Saputra, R., & Effendi, L. M. (2019). Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Angka Kelahiran Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Registratie*, 1(01), 37-60.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

